BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Korea Selatan dan Jepang terjadi ketika Jepang membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan *Japanese – Korean Annexation Treaty*. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 1910, dalam perjanjian tersebut Kekaisaran Jepang akan mengambil alih Kerajaan Korea dan membuatnya menjadi bagian dari Jepang sekaligus akan dijadikan sebagai wilayah jajahan Jepang (Lai, 2002, pp. 36-37). Setelah menjadikan Korea sebagai wilayah jajahannya, Jepang kemudian menganut sebuah prinsip *"Naeseon Ilche"* yang berarti Joseon (Korea) dan Jepang adalah satu, akan tetapi prinsip yang dianut oleh Jepang hanya dilakukan untuk menipu rakyat Korea dan menjadikan Semenanjung Korea untuk mencapai tujuan nasional Jepang (Sook, 2011, p. 46).

Sejak saat itu, Jepang menjadi menguasai urusan politik dalam negeri dan politik luar negeri Korea. Penjajahan dan penguasaan yang dilakukan oleh Jepang terjadi karena Jepang ingin menjadikan Korea sebagai wilayah penopang untuk menghadapi Rusia di Asia Timur dan menjadikan Korea sebagai daerah pangkalan militer guna melakukan agresi ke daratan Tiongkok. Pada tahun 1910 – 1945 yaitu saat masa pendudukan Jepang, militer Jepang membuat peraturan yang menyengsarakan rakyat Korea. Mereka melarang rakyat Korea menggunakan bahasa Korea,

memaksa rakyat Korea untuk menerima budaya Jepang, serta merekrut para wanita Korea secara paksa untuk dijadikan budak seks tentara Jepang (Lankov, 2015). Wanita-wanita itu oleh mereka disebut dengan *ianfu* atau sering disebut dengan *comfort women* (Lee, 2013, p. 512).

Pada masa penjajahan tersebut, para wanita Korea yang dijadikan sebagai budak seks kurang lebih berjumlah sekitar 200.000 wanita dengan umur antara 14-18 tahun, mereka direkrut melalui penipuan atau penculikan. Para wanita tersebut kemudian dipaksa untuk melayani nafsu seks tentara Jepang setiap hari tanpa mendapatkan bayaran sepeserpun, selain melayani seks mereka juga kerap kali dijadikan sebagai objek penyiksaan tanpa alasan yang jelas. Wanita-wanita yang telah direkrut oleh militer Jepang tidak akan bisa melawan atau melarikan diri, apabila mereka melakukannya maka mereka akan mendapatkan hukuman yang siksaannya akan lebih parah. Militer Jepang bahkan menghalangi mereka untuk melakukan bunuh diri dan mengancam akan melukai keluarganya apabila mereka bunuh diri (Lee, 2013, p. 509).

Gambar 1.1 *Comfort Station*
Sumber: *The Korean Council*

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

Awal 1931 Jepang membangun *comfort station* atau tempat *comfort women* dipekerjakan di berbagai daerah kekuasaannya, seperti Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan Korea. Namun, diperkirakan hampir 80% dari mereka berasal dari Korea (Argibay, 2003, p. 376). *Comfort station* dibangun sendiri oleh militer Jepang, mereka menerapkan berbagai aturan dan menyediakan dokter untuk rutin memeriksa dan memastikan para wanita tersebut bebas dari penyakit seks menular. Sistem *comfort women* berakhir setelah kekalahan Jepang terhadap sekutu di Perang Dunia II pada tahun 1945. Akan tetapi, para *comfort women* yang masih hidup dibunuh dan dieksekusi oleh militer Jepang. Hal tersebut dilakukan agar Jepang tidak perlu bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan kepada para *comfort women* di pengadilan perang nantinya, hanya 30% dari jumlah keseluruhan yang masih hidup setelah perang berakhir (Yōko, 1999-2000, pp. 54-55).

Isu *comfort women* sering menjadi tantangan dan hambatan dalam hubungan bilateral Jepang dengan Korea Selatan. Kim Hak Sun dan beberapa mantan *comfort women* melakukan gugatan terhadap pemerintahan Jepang dan meminta bertanggung jawab serta meminta maaf, hal itu ditandai sebagai awal munculnya isu *comfort women* pada tahun 1991 (Asian Women's Fund, n.d.). Isu tersebut muncul bersamaan dengan protesnya masyarakat Korea Selatan kepada Jepang agar menuruti tuntutan Korea Selatan. Kelompok aktivis Korea Selatan *The Korean Council* bahkan sampai membuat patung seorang gadis yang berpakaian *hanbok* atau

pakaian tradisional Korea diiringi dengan bayangan perempuan tua di bawah kakinya. Patung yang melambangkan simbol perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang tersebut diletakkan di bagian depan Kedutaan Besar Jepang di Korea Selatan (Dharma, 2015).

Gugatan dari para penyintas pun kemudian mendapatkan respon dari Ketua Sekretaris Kabinet pada masa itu yaitu Kato Koichi. Menurut Kato Koichi *comfort station* memang ada, tetapi tidak ada bukti bahwa pemerintah Jepang ikut terlibat dalam proses perekrutan secara paksa. Selain Ketua Sekretaris Kabinet, Perdana Menteri Miyazawa Kiichi juga menyatakan permintaan maaf dan menyesal kepada para korban yang telah dijadikan sebagai budak seks, Miyazawa Kiichi mengucapkan permintaan maaf ketika melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan pada tahun 1992 (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013).

Pengakuan paling lengkap kemudian diungkapkan oleh Yohei Kono pada tanggal 4 Agustus 1993, pengakuan itu kemudian disebut dengan *Kono Statement. Kono Statement* adalah pengakuan Yohei Kono mengenai adanya perekrutan secara paksa dan adanya tindakan serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993). Permohonan maaf juga disampaikan oleh Perdana Menteri masa jabatan 1994 – 1996 Murayama Tomiichi, pernyataan maaf Perdana Menteri Murayama berdampak positif terhadap tuntutan Korea Selatan terkait *comfort women.* Pada 19 Juli 1995, Jepang kemudian membangun lembaga pendanaan untuk memberikan kompensasi kepada para mantan

comfort women. Lembaga tersebut bernama *Asian Women's Fund* yang pada awal pembentukannya mendapatkan dana sumbangan sebanyak 400 juta yen dan diberikan kepada mantan *comfort women* yang masih hidup sebesar 2 jutan yen perorang (Asia Women's Fund, n.d.).

Dana yang diberikan oleh *Asian Women's Fund* kemudian diprotes oleh mantan *comfort women*, aktivis, dan pemerintah Korea Selatan mereka beranggapan bahwa dana yang didapatkan tidak murni berasal dari anggaran pemerintah Jepang melainkan dari donasi beberapa pihak. *Asian Women's Fund* kemudian dibubarkan pada akhir Maret 2007 setelah memberikan kompensasi kepada para mantan *comfort women* di berbagai negara (Asia Women's Fund, n.d.). Meskipun Jepang telah meminta maaf dan memberikan kompensasi, akan tetapi hal itu masih terasa kurang bagi Korea Selatan dan para mantan *comfort women.* Jepang dan Korea Selatan memiliki pandangan berbeda dalam memahami isu *comfort women.*

Korea Selatan dan Jepang memandang berbeda isu *comfort women*, Jepang berpendapat bahwa isu tersebut sudah berakhir pada 1965 saat adanya kesepakatan normalisasi hubungan, lalu menurut pemerintah Korea Selatan isu *comfort women* adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea, 2017). Karena perbedaan persepsi mengenai isu *comfort women* tersebut akhirnya memberikan kendala besar dalam hubungan bilateral antara Korea Selatan dengan Jepang. Pada tahun 2013 saat masa jabatan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye berpendapat

bahwa dibutuhkan suatu langkah untuk menyelesaikan isu *comfort women* untuk memperbaiki hubungan kedua negara (Hong-ji, 2015).

Kemudian pada April 2014 Korea Selatan dan Jepang melakukan suatu pertemuan untuk bernegosiasi mengenai isu *comfort women*, dan akhirnya kedua negara tersebut mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pada 28 Desember 2015 melalui perjanjian yang dinamakan *Japan – ROK Agreement on Comfort Women* atau biasa disebut dengan *Comfort Women Agreement*, sebuah kesepakatan yang dicapai oleh Jepang dan *Republic of Korea* (ROK) atau Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah *comfort women* Korea yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang (VOA News, 2017). Pemerintahan Jepang meminta maaf dan mau bertanggung jawab dengan bersedia membayar komepensasi menggunakan dana pemerintah sebesar 1 miliar yen. Namun, pemerintah Jepang juga meminta patung *comfort women* segera dipindahkan dan meminta Korea Selatan untuk tidak membahas isu *comfort women* di forum internasional. Kedua negara bertekad untuk memperbaiki hubungan bilateral melalui perjanjian tersebut. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015).

Namun, setelah perjanjian tersebut ditandatangani terjadi luapan di Korea Selatan dan Jepang. Di Korea Selatan muncul beberapa masyarakat yang kecewa dan marah karena para penyintas tidak diikutsertakan dalam merumuskan perjanjian. Isi perjanjian itu juga tidak menuturkan permintaan maaf yang tulus dari Jepang karena dalam permintaan maaf tersebut Jepang tidak merujukan untuk penyintas *comfort women* (Hardoko, 2017).

Masyarakat Jepang juga kecewa dengan penandatanganan perjanjian tersebut karena dianggap telah membuat derajat Jepang menjadi buruk (Wingfield-Hayes, 2015).

Setelah masa pemerintahan kepresidenan Park Geun-hye digantikan oleh Moon Jae-in dan Moon membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation* yang termasuk dalam *Comfort Women Agreement* tahun 2015. Dengan membubarkan dan membatalkan bagian itu maka sama saja Moon menolak kesepakatan 2015 tersebut (Kang, 2018). Moon juga mengutarakan ketidaksetujuan dari para penyintas mengenai *Comfort Woman Agreement*. Hal yang dibutuhkan oleh mereka adalah tanggung jawab dan permintaan maaf, bukan sekadar uang.

Walaupun beberapa pihak yang menjadi tersangka telah mengutarakan permintaan maafnya, namun hal itu dipandang tidak tulus. Kesepakatan itu tidak cukup mencerminkan pendapat mantan *comfort women*, dan Moon sendiri mengatakan kesepakatan itu tidak akan menyelesaikan masalah *comfort women* (The Japan Times, 2018). Moon juga menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan martabat dan kehormatan mantan *comfort women*, terutama warga Korea Selatan yang dipaksa menjadi budak seks selama Perang Dunia II. Moon mengatakan akan mengangkat isu *comfort women* di komunitas internasional dari perspektif universal kemanusiaan (Nippon.com, 2019). Kesepakatan pada tahun 2015 dan pembubaran bagian

kesepakatan tersebut membawa dampak buruk terhadap hubungan Korea Selatan dan Jepang.

Dari penjelasan tersebut, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahannya. Permasalahan utamanya adalah *Comfort Women Agreement* yang ditandatangani pada masa Park Geun-hye dengan diharapkan akan memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Jepang. Namun di era Moon Jae-in perjanjian itu malah dibatalkan. Penulis mengidentifikasikan mengapa Moon Jae-in membatalkan perjanjian yang dibuat untuk memperbaiki hubungan negaranya dengan Jepang. Lalu permasalahan kedua yaitu pembatalan *Comfort Women Agreement* oleh Korea Selatan yang berimbas pada hubungan Korea Selatan dan Jepang. Pembatalan *Comfort Women Agreement* yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut membuat hubungan Korea Selatan dan Jepang menjadi semakin merenggang.

Penulis juga memahami adanya urgensi dalam penelitian ini. Dengan dibentuknya *Comfort Women Agreement* di masa Presiden Park Geun-hye yang bertujuan untuk menyelesaikan isu masa lalu sehingga hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang menjadi membaik membuat beberapa masyarakat Korea Selatan marah dan tidak setuju. Dari sini penulis beranggapan bahwa memungkinkan adanya kebijakan yang dibuat oleh Moon Jae-in untuk menjadikan urgensi bagi penulis. Selain itu kebijakan yang dibuat oleh Moon Jae-in itu juga berdampak pada hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Mengapa Moon Jae-in membuat kebijakan untuk membatalkan *Comfort Women Agreement?*
2. Bagaimana hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang setelah dibatalkannya *Comfort Women Agreement?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan Moon Jae-in membuat kebijakan untuk membatalkan *Comfort Women Agreement.*
2. Untuk mengetahui arah hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang setelah pembatalan *Comfort Women Agreement*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran terkait isu *comfort women* pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

2. Sebagai bahan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat isu yang sama dengan penelitian ini. Khususnya permasalahan kebijakan pembatalan *Comfort Women Agreement* yang dibuat Moon Jae-in dan dampaknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

1. Menambah materi bagi penulis dan pembaca perihal kebijakan pembatalan *Comfort Women Agreement* yang dibuat Moon Jae-in dan dampaknya.
2. Memberikan wawasan dan edukasi tambahan khususnya dalam pembahasan *Comfort Women Agreement* dan hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat, dan tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dan sistematika penulisan.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel jurnal, dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen-instrumen, tempat, dan waktu.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai uraian dari topik skripsi Kebijakan Pembatalan *Comfort Women Agreement* di Era Moon Jae-in dan Dampaknya terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan – Jepang.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA